JURNAL ALTIFANI
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 6, No. 5 - September 2026, Hal. 3247-3256
DOI: 10.59395/altifani.v6i5.1530

Implementasi Model Pemberdayaan Masyarakat Kampung Nelayan Sejahtera (KNS) di Indramayu dan Deli Serdang

The Implementation Of The Prosperous Fishermen Village (KNS) Social Empowerment Model In Indramayu Regency, And Deli Serdang Regency

Bambang Rustanto*[1], Pribowo[2], Syafei Nasution[3]
[1,2,3]Program Studi Pekerjaan Sosial, Poltekesos Bandung
*e-mail: rustantostks@gmail.com[1], Pribowostks@gmail.com[2], syafiinasution8877@gmail.com[3]

Received:	Revise:	Accepted:	Available online:
28.08.2026	20.09.2026	28.09.2026	30.09.2026

Abstract *: This study examines the implementation of the Prosperous Fishermen Village (KNS) social empowerment model in Eretan Village, Indramayu Regency, and Bagan Kuala Village, Deli Serdang Regency, facing multidimensional vulnerabilities due to abrasion, tidal floods, structural poverty, and heavy dependence on traditional middlemen. Utilizing a qualitative approach with a case study strategy and cycle, data collection involved in-depth interviews with 20 key informants, participant observation, and document studies.The findings indicate that integrated interventions—including climate-adaptive Prosperous Integrated Houses (RST), communal clean water installations, independent fishermen cooperatives, fisheries product downstreaming, and Disaster Preparedness Groups (KSB)—successfully transformed vulnerable settlements into inclusive, independent areas. Fishermen household incomes increased by 38.5%, stunting prevalence decreased significantly, and reliance on middlemen dropped from 82% to below 25%. From the perspective of rural sociology and community social work, the KNS model effectively dismantled dependency culture and strengthened community social capital through a pentahelix synergy involving the government, Baznas, the private sector, academics, and local communities. This model serves as an effective national blueprint for coastal region development based on structural mitigation and community participation.*
Keywords*: Social Empowerment, Prosperous Fishermen Village, Coastal Vulnerability, Community Social Work, Rural Sociology****.***

Abstrak : Penelitian ini mengkaji implementasi model pemberdayaan sosial Kampung Nelayan Sejahtera (KNS) di Desa Eretan, Kabupaten Indramayu, dan Desa Bagan Kuala, Kabupaten Deli Serdang, yang menghadapi kerentanan multidimensional akibat abrasi, banjir rob, kemiskinan struktural, serta ketergantungan pada sistem ijon tengkulak. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus dan siklus partisipatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 20 informan kunci, observasi partisipatif, serta studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi terpadu melalui pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) adaptif iklim, instalasi air bersih komunal, penguatan Koperasi Nelayan Mandiri, hilirisasi produk perikanan, serta pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) berhasil mentransformasi kawasan permukiman kumuh menjadi wilayah yang inklusif dan mandiri. Pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan meningkat sebesar 38,5%, prevalensi stunting menurun signifikan, dan ketergantungan pada tengkulak merosot dari 82% menjadi di bawah 25%. Dari perspektif sosiologi perdesaan dan pekerjaan sosial komunitas, model KNS efektif meruntuhkan *dependency culture* dan memperkuat modal sosial warga melalui sinergi *pentahelix* yang melibatkan pemerintah, Baznas, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Model ini direkomendasikan sebagai *blueprint* nasional pembangunan wilayah pesisir berbasis mitigasi struktural dan partisipasi komunitas.
Kata Kunci: Pemberdayaan Sosial, Kampung Nelayan Sejahtera, Kerentanan Pesisir, Pekerjaan Sosial Komunitas, Sosiologi Perdesaan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mewujudkan lingkungan hunian inklusif, tangguh, dan berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan sosial, kemandirian ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah melalui kolaborasi lintas sektor dan pelayanan terpadu telah menjadi landasan fundamental dalam merumuskan paradigma pembangunan kawasan pesisir di Indonesia. Transformasi ini diwujudkan secara nyata melalui model pemberdayaan sosial Kampung Nelayan Sejahtera (KNS). Masyarakat pesisir, yang sebagian besar menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor perikanan tangkap dan budidaya skala kecil tradisional, kerap kali berada pada posisi

Vol. 6, No. 5 - September 2026, Hal. 3247-3256
DOI: 10.59395/altifani.v6i5.1530

yang sangat rentan secara ekologis, ekonomis, maupun sosial. Kerentanan struktural yang dialami oleh komunitas pesisir ini tidak berdiri sendiri, melainkan semakin diperparah oleh dinamika perubahan iklim global yang memicu peningkatan muka air laut secara signifikan, abrasi garis pantai yang masif dan tidak terkendali, serta fenomena banjir rob yang datang berulang kali sepanjang tahun. Bencana ekologis ini merendam permukiman warga, merusak infrastruktur dasar desa, serta melumpuhkan aktivitas ekonomi harian yang menjadi tumpuan hidup masyarakat.

Kawasan pesisir Pantai Indramayu di Jawa Barat dengan spesifikasi empiris di Desa Eretan (yang mencakup wilayah administratif Desa Eretan Kulon dan Eretan Wetan di Kecamatan Kandanghaur) serta kawasan pesisir Kabupaten Deli Serdang di Sumatera Utara (yang membentang di sepanjang perairan strategis Selat Malaka, khususnya di Desa Bagan Kuala di Kecamatan Pantai Labu) merepresentasikan potret nyata dari kompleksitas permasalahan tersebut. Di satu sisi, wilayah-wilayah ini memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah, menjadi tumpuan utama pasokan pangan protein hewani regional, serta berfungsi sebagai simpul strategis ekonomi maritim lokal. Namun, di sisi lain, masyarakatnya harus berhadapan dengan degradasi kualitas lingkungan permukiman yang parah, keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi layak, tingginya angka kemiskinan pesisir, serta rendahnya tingkat ketahanan ekonomi keluarga akibat fluktuasi hasil tangkapan ikan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca ekstrem di tengah laut.

Data statistik makro dan mikro menggambarkan betapa rentannya kehidupan masyarakat nelayan di kedua wilayah tersebut. Di Kabupaten Indramayu, sektor perikanan merupakan salah satu penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar, dengan jumlah penduduk yang bekerja sebagai nelayan mencapai puluhan ribu jiwa. Namun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS 2025) serta catatan resmi Dinas Perikanan dan Kelautan setempat, kantong-kantong permukiman nelayan di wilayah pesisir seperti Desa Eretan menghadapi tekanan lingkungan yang luar biasa berat. Lebih dari 65% rumah tangga nelayan di Eretan tinggal di dalam hunian semi-permanen atau kategori tidak layak huni yang berada tepat di garis sempadan pantai. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan terhadap hantaman gelombang pasang rob yang terjadi hampir setiap bulan, merusak struktur bangunan, dan mengancam keselamatan jiwa penghuninya.

Tingkat pendidikan formal kepala keluarga nelayan di wilayah pesisir Indramayu ini didominasi oleh tamatan sekolah dasar atau bahkan tidak pernah menamatkan pendidikan formal, yang berimplikasi langsung pada rendahnya literasi finansial serta keterbatasan kemampuan adaptasi terhadap modernisasi alat tangkap maupun diversifikasi ekonomi. Pendapatan harian nelayan tradisional di Eretan sangat fluktuatif, kerap kali berada jauh di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) ketika musim angin barat atau musim paceklik ikan tiba. Kondisi tersebut memaksa sebagian besar keluarga nelayan untuk terjerat dalam lingkaran utang yang mengakar pada tengkulak lokal atau rentenir melalui skema ijon yang eksploitatif. Berdasarkan data BPS Kabupaten Indramayu, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di kecamatan pesisir seperti Kandanghaur berada di atas rata-rata angka kemiskinan perdesaan daratan kabupaten tersebut, di mana sekitar 22,4% dari total populasi nelayan terkategori hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem dengan pengeluaran per kapita yang berada di bawah standar kebutuhan hidup layak minimum (BPS Kab. Indramayu, 2025) .

Kondisi serupa, bahkan dengan karakteristik sosio-ekologis yang memiliki tantangan spesifik tersendiri, ditemukan pula di Desa Bagan Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebagai wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan perairan strategis Selat Malaka, Bagan Kuala sebenarnya memiliki potensi ekowisata mangrove serta potensi perikanan darat dan laut yang cukup besar. Meskipun demikian, data dari instansi terkait menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat nelayan tradisional di Deli Serdang menghadapi tantangan berat berupa abrasi pantai yang telah mengikis puluhan hektare daratan dalam dua dekade terakhir, merusak infrastruktur jalan desa, menghancurkan sabuk hijau pantai, dan mengancam keselamatan ratusan rumah warga yang berdiri di bibir pantai.

Angka kemiskinan pada tahun 2025 di kawasan pesisir Deli Serdang cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata wilayah daratan kabupaten tersebut. Kondisi ini dipicu oleh menyusutnya

Vol. 6, No. 5 - September 2026, Hal. 3247-3256
DOI: 10.59395/altifani.v6i5.1530

daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) akibat kompetisi dengan kapal pencari ikan modern yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, pencemaran perairan laut akibat limbah domestik dan industri, serta minimnya fasilitas pelayanan kesehatan terpadu dan sanitasi lingkungan yang memadai. Berdasarkan data statistik daerah, lebih dari 70% rumah di kawasan pesisir Bagan Kuala belum memiliki akses terhadap sanitasi layak dan air bersih perpipaan. Akibatnya, anak-anak nelayan di wilayah ini sangat rentan terhadap masalah stunting, gizi buruk, serta berbagai penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Angka kemiskinan absolut di kalangan nelayan tangkap di Bagan Kuala bahkan menyentuh kisaran 28,5%, jauh melampaui rata-rata kemiskinan Kabupaten Deli Serdang secara keseluruhan yang berada di angka sekitar 7,8%.

Mewujudkan permukiman pesisir yang inklusif dan berkelanjutan merupakan landasan fundamental pembangunan kawasan maritim Indonesia. Model pemberdayaan sosial Kampung Nelayan Sejahtera (KNS) hadir sebagai respons kebijakan yang strategis terhadap kerentanan multidimensional masyarakat pesisir, menavigasikan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan yang bersifat *top-down* dan karitatif menuju pembangunan partisipatif yang komprehensif (Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, 2024; Surya et al., 2021) . Kawasan pesisir Desa Eretan (Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu) dan Desa Bagan Kuala (Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang) merepresentasikan potret nyata dari kompleksitas permasalahan pesisir di Indonesia. Di satu sisi, kedua wilayah memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah ruah. Di sisi lain, masyarakatnya harus berhadapan dengan degradasi kualitas lingkungan permukiman yang parah: abrasi pantai yang terus meluas, banjir rob rutin dengan ketinggian genangan mencapai 30 hingga 70cm setiap bulannya, pencemaran air sumur penduduk, serta keterbatasan akses terhadap sanitasi dan air bersih yang layak (BPS Kab. Deli Serdang, 2025; BPS Kab. Indramayu, 2025) .

Data lapangan yang dihimpun menunjukkan bahwa lebih dari 65% rumah tangga nelayan di Desa Eretan menghuni bangunan semi-permanen di garis sempadan pantai yang sangat rawan, sementara di Desa Bagan Kuala lebih dari 70% rumah warga berada dalam kondisi terancam abrasi Selat Malaka. Secara ekonomi, struktur pasar ikan tradisional di kedua wilayah tersebut sangat didominasi oleh jaringan tengkulak melalui sistem ijon. Sistem ini menyebabkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) senantiasa terperangkap dalam posisi yang sangat marjinal dan tidak menguntungkan (Satria, 2014) . Ketidaksetaraan gender di sektor perikanan pesisir semakin memperparah kerentanan struktural ini. Perempuan nelayan, meskipun memegang peran krusial dan berkontribusi besar dalam pengolahan hasil tangkapan pascapanen serta pengelolaan keuangan domestik, kerap kali dipinggirkan dari akses terhadap permodalan formal, pelatihan keterampilan lanjutan, dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat keluarga maupun komunitas (Stacey et al., 2021). Kajian mendalam yang dilakukan oleh Fathy (2019) menegaskan bahwa keterbatasan modal sosial dan kelembagaan lokal yang lemah merupakan akar permasalahan dari kemiskinan struktural yang membelenggu masyarakat nelayan tradisional di kawasan pesisir.

Sejumlah studi terdahulu telah berupaya mengkaji dinamika pemberdayaan masyarakat pesisir dari berbagai sudut pandang akademis. Puspitasari (2024) menemukan bahwa perspektif modal sosial terbukti efektif ketika digunakan sebagai kerangka dasar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Di sisi lain, A'yun (2017) mengidentifikasi karakteristik fisik permukiman nelayan serta strategi penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) di kawasan Pantai Utara Jawa. Sementara itu, Umasugi & Adam (2024) menekankan pentingnya sinergi antara program pemberdayaan masyarakat dengan program perlindungan sosial dari pemerintah. Kendati demikian, kajian ilmiah yang secara sistematis, komprehensif, dan mendalam mendokumentasikan implementasi model Kampung Nelayan Sejahtera (KNS) di dua lokasi dengan karakteristik ekologis dan sosiologis yang berbeda masih sangat terbatas jumlahnya.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi objektif kerentanan sosial, ekonomi, dan ekologis yang dihadapi oleh masyarakat nelayan di Desa Eretan dan Desa Bagan Kuala sebelum

Vol. 6, No. 5 - September 2026, Hal. 3247-3256
DOI: 10.59395/altifani.v6i5.1530

dilakukannya intervensi program, menganalisis efektivitas setiap tahapan implementasi model KNS di lapangan, serta mengidentifikasi dampak nyata dari penerapan model KNS terhadap peningkatan kemandirian ekonomi, perluasan akses layanan sosial dasar, dan penguatan ketahanan bencana pada komunitas pesisir.

Menghadapi realitas empiris yang kompleks tersebut, model pemberdayaan sosial Kampung Nelayan Sejahtera (KNS) hadir sebagai sebuah terobosan kebijakan publik yang dirancang secara integratif, holistik, dan komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik semata seperti penyediaan rumah layak huni dan pembangunan fasilitas sanitasi dasar tetapi juga menitikberatkan pada transformasi sosial yang mendalam, penguatan kapasitas sumber daya manusia, mitigasi bencana berbasis komunitas, serta pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta melalui program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), lembaga *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari berbagai korporasi, akademisi perguruan tinggi, serta pelibatan partisipasi aktif masyarakat secara langsung, model KNS dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural di kawasan pesisir secara sistematis dan terstruktur.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dalam pertanyaan penelitian berikut: (1) Bagaimana efektivitas penerapan model pemberdayaan sosial Kampung Nelayan Sejahtera (KNS) dalam mentransformasi kawasan permukiman pesisir yang rentan terhadap ancaman abrasi dan banjir rob di Desa Eretan dan Desa Bagan Kuala? (2) Sejauh mana intervensi pembangunan infrastruktur terpadu dan diversifikasi ekonomi melalui kelembagaan koperasi dapat meningkatkan taraf hidup serta kemandirian finansial keluarga nelayan tradisional di kedua wilayah studi? (3) Apa saja tantangan utama yang dihadapi serta faktor-faktor penentu keberhasilan dalam membangun ketahanan masyarakat pesisir melalui pendekatan partisipatif lintas sektor (*pentahelix*) di Desa Eretan dan Desa Bagan Kuala?

2. METODE

2.1. Pendekatan dan Strategi Penelitian

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena menempatkan masyarakat nelayan di Desa Eretan, Kabupaten Indramayu, dan Desa Bagan Kuala, Kabupaten Deli Serdang, bukan sekadar sebagai objek sasaran yang pasif, melainkan sebagai subjek utama yang aktif berpartisipasi dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, mengeksekusi program, hingga melakukan evaluasi secara mandiri. Melalui siklus penelitian yang dinamis, peneliti bersama komunitas secara kontinu merefleksikan hambatan struktural yang dihadapi seperti terjebaknya nelayan dalam sistem ijon tengkulak dan parahnya abrasi garis pantai untuk kemudian merumuskan tindakan kolektif yang transformatif. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap intervensi sosial yang dirancang benar-benar berakar dari kebutuhan riil di tingkat tapak (*grassroots*), bukan sekadar proyek *top-down* yang rentan terhadap kegagalan pasca-implementasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Creswell & Creswell (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada proses pemahaman makna yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok sosial terhadap suatu masalah, dengan menekankan pengumpulan data naturalistik dalam latar yang wajar dan relevan untuk menggali pengalaman hidup masyarakat nelayan secara mendalam. Strategi studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata mereka, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan jelas.

Vol. 6, No. 5 - September 2026, Hal. 3247-3256
DOI: 10.59395/altifani.v6i5.1530

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di dua lokasi utama, yaitu di Desa Eretan (mencakup Eretan Kulon dan Eretan Wetan), Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat; serta Desa Bagan Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemilihan kedua lokasi ini didasarkan pada pertimbangan kesamaan tipologi ekologis sebagai wilayah pesisir yang rentan terhadap abrasi dan banjir rob, namun memiliki karakteristik sosio-kultural dan kelembagaan lokal yang unik. Implementasi program dan proses pengumpulan data kualitatif berlangsung dalam tiga fase terstruktur dari Februari hingga Mei 2026:

Fase Pertama (Februari – Maret 2026): Berfokus pada pemetaan partisipatif, penyusunan profil kerentanan wilayah, dan perintisan pembangunan fisik Rumah Sejahtera Terpadu (RST).
Fase Kedua (April 2026): Menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan diversifikasi olahan hasil laut dan pembentukan kelembagaan koperasi nelayan mandiri.
Fase Ketiga (Mei 2026): Diarahkan pada penguatan layanan sosial dasar, pencegahan stunting melalui optimalisasi peran posyandu, peningkatan literasi keuangan digital bagi keluarga nelayan, serta penguatan mitigasi bencana berbasis komunitas (Kementerian Sosial RI, 2026).

2.3. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria keterlibatan langsung, penguasaan informasi, dan representasi peran dalam struktur sosial masyarakat pesisir. Total informan kunci yang dilibatkan berjumlah 20 orang yang terdistribusi secara seimbang ke dalam dua wilayah studi:
Desa Eretan, Indramayu (10 informan): Terdiri dari 7 informan laki-laki yang meliputi ketua rukun nelayan, tokoh agama, pengurus koperasi, dan nelayan senior; serta 3 informan perempuan yang mencakup perwakilan kelompok pengolah ikan pindang/terasi dan perempuan kepala keluarga (*breadwinner*).

Desa Bagan Kuala, Deli Serdang (10 informan): Terdiri dari 5 informan laki-laki yang mencakup kepala dusun, pengurus kelompok usaha bersama (KUB), dan nelayan tangkap tradisional; serta 5 informan perempuan yang meliputi penggerak posyandu, perwakilan kelompok perempuan pesisir, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) olahan hasil laut.
Komposisi gender yang proporsional ini sengaja dirancang untuk menangkap perspektif yang inklusif dan berkeadilan gender, mengingat kontribusi perempuan nelayan dalam rantai pasok ekonomi pascapanen sering kali terabaikan dalam pencatatan formal.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen utama yang saling melengkapi (triangulasi data) guna memastikan kedalaman dan validitas informasi:
Wawancara Mendalam Semi-Terstruktur (*In-depth Interview*): Dilakukan kepada seluruh informan kunci menggunakan panduan wawancara yang fleksibel namun terarah. Wawancara ini ditujukan untuk menggali informasi historis mengenai riwayat kerentanan wilayah, dinamika perekonomian rumah tangga, pola hubungan patron-klien dengan tengkulak, serta respons psikososial masyarakat terhadap pelaksanaan program Kampung Nelayan Sejahtera.

Observasi Partisipatif: Dilakukan melalui keterlibatan langsung peneliti dalam keseharian komunitas di lapangan. Peneliti mengamati secara langsung kondisi fisik permukiman yang terdampak rob, pelaksanaan rehabilitasi lingkungan dan pembangunan infrastruktur dasar, aktivitas ekonomi di tempat pelelangan ikan (TPI) dan sentra pengolahan hasil laut, serta dinamika interaksi sosial dalam forum musyawarah warga.

Studi Dokumen: Dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber data sekunder yang relevan, seperti laporan statistik resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu dan Deli Serdang, dokumen Rencana Aksi Komunitas (RAK), arsip profil desa, laporan keuangan koperasi, serta catatan pelaksanaan program lintas sektor dari instansi pemerintah terkait (Creswell & Creswell, 2018; Miles et al., 2013) .

Vol. 6, No. 5 - September 2026, Hal. 3247-3256
DOI: 10.59395/altifani.v6i5.1530

2.5. Keabsahan Data

Keabsahan dan kredibilitas data dijamin melalui penerapan prinsip triangulasi dan verifikasi yang ketat. Triangulasi dilakukan melalui tiga jalur: pertama, triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh antara informan laki-laki, informan perempuan, dan aparat pemerintah desa. Kedua, triangulasi metode dengan memadukan temuan dari hasil wawancara mendalam, catatan observasi partisipatif, dan telaah dokumen arsip. Ketiga, pelaksanaan konfirmasi ulang atau *member checking* kepada informan utama guna memastikan bahwa interpretasi peneliti selaras dengan realitas dan maksud dari pernyataan informan (Miles et al., 2013) .

2.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles et al. (2013) , yang terdiri dari tiga komponen alur kegiatan yang berlangsung secara simultan:

Kondensasi Data (*Data Condensation*): Tahap ini merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan, transkrip wawancara, serta dokumen sekunder. Data dipilah secara cermat dengan memfokuskan pada temuan-temuan inti yang berkaitan langsung dengan efektivitas program pemberdayaan sosial, transformasi ekonomi, dan mitigasi kerentanan ekologis di kedua desa.

Penyajian Data (*Data Display*): Temuan yang telah dikondensasikan kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, matriks tematik, serta tabel perbandingan antara Desa Eretan dan Desa Bagan Kuala. Penyajian data ini dirancang untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola keseluruhan, mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antarvariabel pemberdayaan, dan menarik benang merah dari fenomena yang diteliti.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*): Pada tahap akhir ini, peneliti mulai memaknai data yang disajikan dengan mencari arti, keteraturan, pola, penjelasan, dan proposisi kausal. Kesimpulan awal yang ditarik terus diverifikasi sepanjang proses penelitian berlangsung melalui pengecekan ulang terhadap catatan lapangan dan diskusi kritis dengan tim pendamping lapang, serta dikaitkan secara komprehensif dengan perspektif teori sosiologi perkotaan-pesisir dan pekerjaan sosial komunitas yang relevan (Miles et al., 2013) .

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi model pemberdayaan sosial Kampung Nelayan Sejahtera (KNS) di Desa Eretan, Kabupaten Indramayu, dan Desa Bagan Kuala, Kabupaten Deli Serdang, memberikan perubahan transformatif yang mencakup dimensi fisik, ekonomi, sosial, dan kelembagaan secara menyeluruh. Keberhasilan program ini merefleksikan efektivitas pendekatan terpadu yang tidak hanya menyasar aspek material semata, tetapi juga merombak struktur sosial dan pola relasi kuasa yang selama ini membelenggu kehidupan masyarakat nelayan tradisional di kawasan pesisir nusantara.

Transformasi infrastruktur dan mitigasi bencana menjadi fondasi awal yang krusial dalam mengubah lanskap permukiman yang sebelumnya rentan. Pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) berkonsep panggung adaptif iklim di kedua desa berhasil merelokasi dan memperbaiki puluhan unit rumah warga yang sebelumnya berada di zona merah abrasi dan rentan terendam banjir rob. Di Desa Eretan, pemasangan sistem pemecah ombak sederhana berbasis penanaman mangrove dan struktur geo-tekstil berhasil mengurangi laju abrasi garis pantai hingga 35% dalam kurun waktu delapan bulan. Di samping itu, pembangunan instalasi pengolahan air payau (*desalination plant*) skala komunal di Desa Eretan dan sumur bor dalam di Bagan Kuala telah memutus ketergantungan warga terhadap air sumur yang tercemar. Sebanyak lebih dari 400 kepala keluarga kini memiliki akses langsung terhadap air bersih yang layak konsumsi, yang berdampak langsung pada penurunan kasus penyakit kulit dan diare pada anak-anak sebesar 45% berdasarkan catatan Poskesdes setempat.

Penguatan ekonomi dan kemandirian finansial masyarakat nelayan diwujudkan melalui pendirian Koperasi Nelayan Mandiri di kedua lokasi. Kelembagaan ekonomi ini berhasil melepaskan sekurang-kurangnya 120 kepala keluarga nelayan dari jeratan ijon tengkulak yang selama bertahun-

Vol. 6, No. 5 - September 2026, Hal. 3247-3256
DOI: 10.59395/altifani.v6i5.1530

tahun mencekik perekonomian rumah tangga mereka. Melalui penyediaan pinjaman modal lunak dengan bunga rendah dan penyediaan bahan bakar solar dengan harga normal, margin keuntungan nelayan tradisional meningkat rata-rata 25% per bulan. Pada sektor hilirisasi produk perikanan, pelatihan pengolahan hasil laut bagi kelompok perempuan nelayan menghasilkan varian produk bernilai tambah tinggi, seperti abon ikan higienis berlabel "Eretan Seafood" dan produk olahan mangrove di Bagan Kuala. Melalui pendampingan *digital marketing*, produk-produk tersebut kini telah menembus pasar regional melalui *marketplace* dan pameran UMKM tingkat kabupaten, menyumbang tambahan pendapatan rumah tangga rata-rata Rp850.000 hingga Rp1.500.000 per bulan per keluarga.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perluasan layanan sosial juga menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui pengintegrasian layanan Posyandu dan pembentukan pusat bimbingan belajar gratis bagi anak-anak nelayan. Program pemberian makanan tambahan berhasil menekan angka prevalensi stunting di Desa Eretan turun dari 28% menjadi 17%, dan di Desa Bagan Kuala dari 31% menjadi 19%. Di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan sosial, pendaftaran kolektif kepala keluarga nelayan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan (jaminan kecelakaan kerja dan kematian) serta BPJS Kesehatan memberikan rasa aman psikologis yang tinggi bagi para nelayan saat harus melaut di tengah cuaca ekstrem. Pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang dilatih langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama akademisi juga meningkatkan kapasitas tanggap darurat warga, ditandai dengan tersusunnya SOP evakuasi mandiri dan beroperasinya sistem peringatan dini sederhana di bibir pantai.

Pembahasan

Temuan lapangan di kedua desa menunjukkan kemiripan struktural dalam hal kerentanan sosio-ekologis. Sebelum intervensi KNS, kedua wilayah menghadapi tekanan ekologis parah akibat abrasi dan banjir rob rutin dengan ketinggian genangan 30 hingga 70 cm per bulan, yang mengkontaminasi sumur air tawar warga dan memicu penyakit berbasis lingkungan. Kondisi ini merupakan manifestasi nyata dari kerentanan struktural yang diidentifikasi Satria (2014) pada komunitas pesisir tradisional Indonesia, di mana nelayan tangkap tidak hanya berhadapan dengan ketidakpastian alam akibat perubahan iklim global, tetapi juga terjebak dalam struktur pasar yang marjinal dan eksploitatif.

Dari perspektif sosiologi perdesaan, kerentanan ini bukan semata-mata persoalan geografis, melainkan manifestasi stratifikasi sosial yang timpang di perdesaan pesisir. Gai (2020) mengidentifikasi bahwa kontrol tengkulak atas alat produksi dan distribusi menciptakan *dependency culture* yang mengakar, di mana nelayan terperangkap dalam lingkaran kemiskinan struktural antargenerasi. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya modal sosial yang diuraikan Fathy (2019) , yaitu keterbatasan kepercayaan (*trust*), norma bersama, dan jaringan kelembagaan yang kuat, sehingga menghambat komunitas pesisir untuk melakukan aksi kolektif mandiri dalam melawan hegemoni struktur pasar yang tidak adil.

Program KNS dieksekusi melalui lima tahapan sistematis sesuai kerangka pemberdayaan Adi (2018) : pemetaan sosial partisipatif, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi, penyediaan layanan sosial dan mitigasi bencana, serta monitoring berkelanjutan. Pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dengan menerapkan desain rumah panggung yang adaptif terhadap kondisi iklim terbukti mampu meningkatkan rasa aman masyarakat dari ancaman banjir rob, sejalan dengan prinsip mitigasi struktural berbasis komunitas yang ditekankan oleh (Kemensos RI, 2023) . Instalasi penjernihan air bersih di Eretan dan jaringan sanitasi sehat di Bagan Kuala berhasil mengatasi krisis air yang berlangsung selama puluhan tahun. Penanaman sabuk mangrove (*mangrove belt*) di sepanjang garis pantai berhasil meredam energi gelombang secara signifikan, sejalan dengan rekomendasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024.

Ditinjau dari sudut pekerjaan sosial komunitas, intervensi fisik ini berfungsi sebagai media pengorganisasian masyarakat (*community organizing*). Melalui pendekatan *action-research* dan

Vol. 6, No. 5 - September 2026, Hal. 3247-3256
DOI: 10.59395/altifani.v6i5.1530

lokakarya partisipatif, warga dilibatkan secara aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pemeliharaan infrastruktur. Perubahan fisik dari permukiman kumuh menjadi kawasan tertata memicu penguatan kohesi sosial dan modal sosial warga (Fathy, 2019) . Ketika masyarakat bekerja bersama membangun rumah panggung atau mengelola fasilitas air bersih komunal, terbentuk kembali rasa kepemilikan kolektif (*sense of belonging*) yang menjadi modal dasar bagi kelembagaan sosial di tingkat lokal.

Koperasi Nelayan Mandiri dan pelatihan vokasi pengolahan hasil laut memberikan dampak multiefek yang signifikan terhadap perekonomian rumah tangga. Perempuan dan istri nelayan di kedua desa menerima pelatihan intensif pengolahan produk bernilai tambah tinggi: abon ikan, kerupuk, dan produk beku (*frozen seafood*) yang telah berlisensi PIRT serta sertifikasi halal. Program *digital marketing* menghubungkan UMKM pesisir dengan platform *e-commerce*, memperluas pangsa pasar ke tingkat regional dan melepaskan ketergantungan mutlak pada tengkulak lokal (Stacey et al., 2021) .

Evaluasi pasca-intervensi menunjukkan peningkatan riil pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan sebesar 38,5%, sementara tingkat ketergantungan pada tengkulak menurun dari 82% menjadi di bawah 25% berkat adanya akses permodalan lunak dari koperasi nelayan mandiri. Analisis gender mengungkap adanya pergeseran peran perempuan dari sektor domestik yang selama ini tidak diakui secara ekonomis menuju aktor penggerak ekonomi produktif utama keluarga. Model KNS berhasil mengintegrasikan perspektif keadilan gender dengan memberikan akses langsung kepada perempuan terhadap pelatihan vokasi, literasi keuangan digital, dan manajemen koperasi, dengan tujuan meningkatkan kapasitas tawar mereka secara substansial dalam pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga maupun komunitas (Gai, 2020; Zastrow, 2017) .

Poskesdes integratif dan program pencegahan stunting berhasil menekan angka gizi buruk pada balita secara signifikan. Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang dibentuk kini telah dilengkapi dengan sistem peringatan dini (*early warning system*) kebencanaan laut bekerja sama dengan BMKG, sehingga berhasil meningkatkan indeks ketahanan masyarakat pesisir terhadap hantaman cuaca ekstrem. Selain itu, seluruh kepala keluarga nelayan telah didaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, memberikan jaminan perlindungan kerja dan sosial yang selama puluhan tahun tidak pernah mereka miliki di sektor informal (Naryatmojo et al., 2025) .

Dari perspektif pekerjaan sosial komunitas dan sosiologi pembangunan, penguatan layanan sosial ini merupakan bentuk pergeseran paradigma dari penanganan karitatif yang bersifat sementara menuju pemenuhan jaminan hak kewarganegaraan (*rights-based approach*). Kehadiran Kelompok Siaga Bencana membuktikan bahwa masyarakat pesisir tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif yang hanya menunggu bantuan darurat ketika bencana datang, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas adaptif tinggi dalam manajemen risiko bencana berbasis komunitas (Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, 2024; Surya et al., 2021) . Melalui sinergi lintas sektor yang terbangun, model KNS berhasil memutus mata rantai kemiskinan struktural sekaligus membangun ketahanan sosial yang berkelanjutan di kawasan pesisir Indramayu dan Deli Serdang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Model pemberdayaan sosial Kampung Nelayan Sejahtera (KNS) yang diterapkan di Desa Eretan, Kabupaten Indramayu, dan Desa Bagan Kuala, Kabupaten Deli Serdang, terbukti efektif sebagai pendekatan holistik dan integratif dalam menyelesaikan persoalan multidimensional kawasan pesisir. Transformasi nyata yang berhasil dicapai mencakup perbaikan kualitas lingkungan dan infrastruktur fisik, penguatan kemandirian ekonomi keluarga melalui kelembagaan koperasi dan hilirisasi produk perikanan, peningkatan derajat kesehatan serta kesejahteraan sosial masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta terbangunnya mitigasi bencana berbasis komunitas yang tangguh. Melalui pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat nelayan sebagai

Vol. 6, No. 5 - September 2026, Hal. 3247-3256
DOI: 10.59395/altifani.v6i5.1530

subjek utama pembangunan, model KNS mampu memutus lingkaran setan kemiskinan struktural, melepaskan ketergantungan yang mengakar pada sistem ijon tengkulak, serta mengubah paradigma masyarakat pesisir dari komunitas yang rentan dan marjinal menjadi aktor pembangunan yang mandiri dan berdaya saing.

Keberhasilan implementasi di kedua wilayah studi menegaskan bahwa sinergi lintas sektor melalui skema kolaborasi pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, sektor swasta, media, dan masyarakat lokal merupakan prasyarat mutlak dalam merespons kompleksitas tantangan ekologis dan sosio-ekonomis di kawasan pesisir Indonesia. Keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap pemetaan masalah, perencanaan program, hingga eksekusi dan evaluasi mandiri (*bottom-up planning*) telah menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif (*sense of belonging*) yang kuat. Hal ini menjamin bahwa seluruh fasilitas dan kelembagaan yang dibangun tidak hanya berhenti pada saat proyek selesai, melainkan terus berputar dan berkembang secara mandiri demi keberlanjutan kesejahteraan generasi masa depan di kawasan pesisir nusantara.

SARAN

Merujuk pada temuan empiris, analisis mendalam, serta evaluasi komprehensif dari pelaksanaan program di Desa Eretan dan Desa Bagan Kuala, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan terkait:

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah
   Model Kampung Nelayan Sejahtera (KNS) direkomendasikan secara khusus untuk diadopsi dan diintegrasikan sebagai *blueprint* atau prototipe nasional dalam dokumen perencanaan pembangunan strategis, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfokus pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu memperkuat sinkronisasi kebijakan anggaran, termasuk optimalisasi alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, guna mereplikasi model intervensi terpadu ini di kantong-kantong kemiskinan pesisir lainnya di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah daerah perlu menerbitkan payung hukum atau peraturan daerah yang memberikan pelindungan khusus bagi nelayan tradisional terhadap ancaman abrasi, pencemaran perairan, serta fluktuasi harga komoditas perikanan.
2. Bagi Akademisi dan Lembaga Riset
   Perlu dilakukan penelitian lanjutan berbasis studi longitudinal (*longitudinal study*) dalam rentang waktu yang lebih panjang untuk memantau, mengukur, dan mengevaluasi dampak sosio-ekonomi jangka panjang dari penerapan teknologi tepat guna yang telah diintroduksi, seperti instalasi desalinasi air payau, penerapan arsitektur rumah panggung adaptif iklim, dan adopsi digital marketing bagi UMKM pesisir. Perguruan tinggi dan lembaga riset juga didorong untuk terus mengembangkan inovasi teknologi mitigasi bencana dan rekayasa ekologi pesisir yang berbiaya rendah, ramah lingkungan, serta mudah direplikasi oleh masyarakat lokal secara mandiri. Peran perguruan tinggi harus diperluas sebagai pusat pengembang kapasitas (*capacity building*) dan pendamping kelembagaan koperasi nelayan agar tata kelola ekonomi di tingkat tapak semakin transparan dan akuntabel.
3. Bagi Sektor Swasta dan Korporasi
   Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* / CSR), khususnya bagi korporasi yang bergerak di sektor maritim, perikanan, energi, dan infrastruktur, disarankan untuk meninggalkan pola bantuan yang bersifat karitatif, parsial, dan sesaat. Korporasi didorong untuk mengadopsi skema kolaborasi lintas sektor yang komprehensif dan berkelanjutan seperti yang diterapkan dalam model KNS. Keterlibatan sektor swasta dapat difokuskan pada penguatan rantai pasok industri perikanan rakyat, penyediaan akses permodalan inklusif, pendampingan sertifikasi mutu produk, serta investasi pada infrastruktur hijau perlindungan pantai. Dengan cara ini, dana CSR tidak hanya menjadi instrumen pencitraan sosial perusahaan, tetapi benar-

Vol. 6, No. 5 - September 2026, Hal. 3247-3256
DOI: 10.59395/altifani.v6i5.1530

benar menjadi katalisator utama dalam menciptakan kemandirian ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan bagi masyarakat rentan di pesisir Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, I. R. (2018). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) - Rajawali Pers*. PT. Raja Grafindo Persada.

A'yun, Q. (2017). Evaluasi Tingkat Kualitas Hidup bagi Permukiman Nelayan di Desa Pesisir Tambak Wedi dengan Kriteria Eco-Settlement. *EMARA: Indonesian Journal of Architecture*, *2*(2), 69. https://doi.org/10.29080/emara.v2i2.24

BPS Kab. Deli Serdang. (2025). *Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2025*.

BPS Kab. Indramayu. (2025). *Kabupaten Indramayu Dalam Angka 2025*.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.

Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, *6*(1), 1. https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463

Gai, A. M. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Berbasis Sustainable Livelihood di Pesisir Kota Surabaya* (Cet.1). Dream Litera Buana.

Kemensos RI. (2023). *Pedoman teknis pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) berbasis Adaptasi Iklim*.

Kemensos RI. (2026). *Laporan pelaksanaan program Kampung Nelayan Sejahtera (KNS) tahun 2026*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Naryatmojo, D. L., Kusumantoro, K., & Khatamy, M. A. (2025). Improvement Capacity Mitigation Disaster Floods in the Village Tambakrejo Through Early Warning System. *Jurnal Abdimas*, *29*(2), 307–312. https://doi.org/10.15294/abdimas.v29i2.35212

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Pub. L. 12, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (2024).

Puspitasari, D. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Terkait Perekonomian di Desa Mororejo Kabupaten Kendal dengan Perspektif Modal Sosial. *SOSEARCH : Social Science Educational Research*, *4*(2), 22–29. https://doi.org/10.26740/sosearch.v4n2.p22-29

Satria, A. (2014). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia & Fakultas Ekologi Manusia IPB.

Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, N. R., Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, D. S., Steenbergen, D. J., & Fitriana, R. (2021). Developing sustainable small-scale fisheries livelihoods in Indonesia: Trends, enabling and constraining factors, and future opportunities. *Marine Policy*, *132*, 104654. https://doi.org/10.1016/J.MARPOL.2021.104654

Surya, B., Suriani, S., Menne, F., Abubakar, H., Idris, M., Rasyidi, E. S., & Remmang, H. (2021). Community Empowerment and Utilization of Renewable Energy: Entrepreneurial Perspective for Community Resilience Based on Sustainable Management of Slum Settlements in Makassar City, Indonesia. *Sustainability*, *13*(6), 1–36. https://ideas.repec.org/a/gam/jsusta/v13y2021i6p3178-d516670.html

Umasugi, M., & Adam, M. D. H. (2024). Increasing Knowledge for Social Assistance Recipients Through Family Development Sessions (FDS) of the Family Hope Program (PKH) in Indonesia. *Ilomata International Journal of Social Science*, *5*(2), 540–553. https://doi.org/10.61194/ijss.v5i2.1147

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, Pub. L. 7, Undang-undang (UU) (2016).

Zastrow, C. (2017). *Empowerment Series: Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People* (12th ed.). Cengage.